

## PENGARUH IPM, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Anjela N Wongkar<sup>1</sup>, Tri Oldy Rotinsulu<sup>2</sup>, Mauna Th. B Maramis<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>*Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

*Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia*

Email : [anjelawongkar6@gmail.com](mailto:anjelawongkar6@gmail.com)

### ABSTRAK

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan secara parsial maupun simultan di Kabupaten Bolaang Mogondow tahun 2015-2021. Penelitian ini menggunakan data Sekunder dengan pendekatan Kuantitatif dengan analisis data Analisis Regresi Linear Berganda dengan sumber data dari Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow, Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara dan DJPK Kemenkeu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial IPM memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Belanja Pemerintah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow. IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Belanja Pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

**Kata Kunci :** *IPM; Tingkat Pengangguran Terbuka; Belanja Pemerintah; Kemiskinan*

### ABSTRACT

*Poverty is a condition of economic inability to meet the average standard of living of the people in an area. This condition of inability is marked by the low ability of income to meet basic needs in the form of food, clothing, and shelter. This low income capability will also result in reduced ability to meet average living standards such as public health standards and education standards. This study aims to determine the effect of HDI, Open Unemployment Rate and Government Expenditures on Poverty partially or simultaneously in Bolaang Mogondow Regency in 2015-2021. This study uses secondary data with a quantitative approach with multiple linear regression analysis data with data sources from the Central Statistics Agency of Bolaang Mongondow, the Central Statistics Agency of North Sulawesi and the DJPK of the Ministry of Finance. The results of the research show that partially HDI has a negative and insignificant effect on poverty in Bolaang Mongondow Regency. The open unemployment rate has a positive and insignificant effect on poverty in Bolaang Mongondow Regency. Government spending has a negative and insignificant effect on poverty in Bolaang Mongondow Regency. HDI, Open Unemployment Rate and Government Expenditures simultaneously have a significant effect on Poverty in Bolaang Mongondow Regency.*

**Keywords:** *HDI; Open Unemployment Rate; Government Expenditures; Poverty*

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang mencerminkan perubahan struktur masyarakat secara keseluruhan baik itu struktur nasional, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional. Perubahan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan dan memberantas kemiskinan (Febrianto, 2017). Di Indonesia kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri (Pratama, 2019).

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan (Hildegunda, 2010). Selain itu, kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang perlu mendapatkan intervensi pada tataran nasional dan juga tataran daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota yang lebih spesifik. Artinya, kebijakan pengentasan kemiskinan yang disusun saat ini tidak lagi bersifat seragam namun perlu memperhatikan kondisi setiap dimensi penyebab kemiskinan suatu wilayah, dengan sumber daya yang terbatas, penyelesaian dimensi kemiskinan perlu berfokus dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat (Bappenas, 2018).

Kabupaten Bolaang Mongondow adalah kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dan ibukotanya adalah Lolak. Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1954, terletak pada salah satu daerah Sulawesi Utara yang secara historis geografis adalah bekas danau, serta merupakan daerah subur penghasil utama tambang dan hasil bumi lainnya. Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengalami sejumlah pemekaran. Tahun 2007 dimekarkan menjadi Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2008 dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan daerah yang juga memiliki permasalahan pada tingkat kemiskinan.

**Tabel 1. Angka Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015-2021**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase (%)
2015	20.04	8,63
2016	19.55	8,34
2017	19.05	8,02
2018	18.49	7,67
2019	18.3	7,47
2020	18.07	7,27
2021	19.08	7,58

*Sumber Data : Badan Pusat Statistik Bolmong (2022)*

Dilihat dari data tabel 1, Angka Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2015 sebesar 8,63 persen dan pada tahun 2016 sebesar 8,34 persen. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 masing-masing sebesar 8,02 persen, 7,67 persen dan 7,47 persen. Kemudian pada tahun 2020 masih terus mengalami penurunan menjadi 7,27%. Meskipun sempat mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2015 sampai tahun 2020, namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan menjadi 7,58%.

**Tabel 2. Data IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015-2021**

Tahun	IPM (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Belanja Pemerintah (milyar)
2015	65,03	5,77	823,97
2016	65,73	5,77	953,19
2017	66,08	4,88	1031,26
2018	66,91	3,58	1005,94
2019	67,82	4,18	1044,89
2020	67,89	4,87	1014,63
2021	68,16	4,85	986,8

*Sumber Data : Badan Pusat Statistik Bolmong, Badan Pusat Statistik Sulut, DJPK Kemenkeu (2022)*

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat dilihat dari perkembangan angka indeks pembangunan manusia. Angka IPM Kabupaten Bolaang Mongondow periode 2015-2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, angka IPM Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 65,03

persen dan terus meningkat hingga mencapai 68,16 persen pada tahun 2021. Selain itu, dalam kondisi kemiskinan suatu daerah, tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran menjadi semakin serius apalagi pada tingkat pengangguran terbuka, seseorang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Besarnya tingkat pengangguran merupakan cerminan kurang berhasilnya pembangunan di suatu daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan bahwa persentasenya cenderung naik turun, mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,77 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2017 dan tahun 2018 menjadi 4,88 persen dan 3,58 persen. Kemudian di tahun 2019 mulai mengalami kenaikan sampai pada tahun 2020 yaitu menjadi 4,18 persen dan 4,87 persen, Dan di tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Bolaang Mongondow mengalami penurunan lagi menjadi 4,85 persen.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah mempunyai kesempatan untuk menangani masalah kerentanan tinggi yang dimiliki penduduk miskin dengan cara mengarahkan belanja pemerintah ke dalam sistem perlindungan sosial yang mampu mengurangi kerentanan tersebut. Pemerintah juga berwenang untuk mengatur roda perekonomian dengan menentukan penerimaan dan pengeluaran belanja pemerintahan yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Belanja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2015 sampai tahun 2021 terjadi fluktuasi. Pada tahun 2015 belanja pemerintah senilai 823,97 milyar dan mengalami kenaikan sampai tahun 2017 menjadi 1031.26 milyar, kemudian pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 1005.94 milyar namun mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019 menjadi 1044.89 milyar. Tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan sampai di tahun 2021 menjadi 986,8 milyar.

Mengatasi masalah kemiskinan adalah usaha untuk menunjang perubahan dan kemajuan ekonomi serta memberikan kesempatan lebih besar untuk memecahkan berbagai masalah sosial. Mengatasi kemiskinan dilakukan secara terpadu sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Maka, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah penurunan jumlah penduduk miskin (Sari, 2021). Adanya kemiskinan dapat dipengaruhi oleh IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Belanja Pemerintah,

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Belanja Pemerintah terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh IPM, TPT dan Belanja Pemerintah secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Kemiskinan**

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan tidak dapat dihindari dari kehidupan bermasyarakat. Penyebab dasar dari adanya kemiskinan yaitu: Adanya kegagalan kepemilikan terutama kepemilikan tanah dan modal, keterbatasan persediaan kebutuhan dasar, sarana maupun prasarana di masyarakat, kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor, adanya perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung, adanya perbedaan kemampuan sumber daya manusia dan perbedaan sektor ekonomi yaitu ekonomi modern dengan ekonomi tradisional, rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal usaha yang ada di masyarakat, budaya hidup masyarakat yang dikaitkan dengan kemampuan mengelola sumber daya alam dan lingkungan sekitarnya, tidak adanya

tata pemerintahan yang baik dan bersih, pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak mempedulikan lingkungan sekitar (F.Tuwonaung, 2022). Mountjoy (1978) menentukan penyebab kemiskinan berawal dari langkanya modal, kemudian berakibat pada produktifitas rendah, pendapatan rendah, daya beli dan tabungan rendah yang berakhir pada kegagalan pembentukan modal (capital formation) (Girsang, 2011).

## 2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representative. IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP. Teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat, antara lain; diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan dan tambahan pendapatan seseorang apabila mampu menyelesaikan tingkat pendidikan dibawahnya (Goni, Kalangi, Tolosang, 2022).

Menurut Badan pusat statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) membangun indeks ini untuk menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimilikinya dalam pembangunan. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (BPS, 2021).

## 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama. Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal (Muhdar, 2018).

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan akibat adanya pengangguran antara lain :

1. Dampak pengangguran terhadap perekonomian
  - a) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang.
  - b) Pengangguran tidak menggalakan pertumbuhan ekonomi.
  - c) Pengangguran dapat menyebabkan msyarakat tidak dapat memaksimumkan pendapatan nasional yang sebenarnya dicapai lebih rendah daripada pendapatan nasional potensial.
2. Dampak pengangguran bagi individu masyarakat
  - a) Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan.
  - b) Pengangguran menyebabkan kehilangan ketrampilan.
  - c) Pengangguran dapat menyebabkan timbulnya penyakit sosial masyarakat ( Ayu, 2018).

## 2.4 Belanja Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk mengembangkan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat. Pembelian pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua golongan utama yaitu pengeluaran penggunaan pemerintah atas konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah (Sukirno, 2013).

Pengeluaran pemerintah bersifat endogen dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan dampak perkembangan ekonomi. Pandangan ini melihat secara pesimis, bahwa pengeluaran pemerintah seharusnya dikurangi atau dibatasi agar pengeluaran tidak tumbuh lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang ditawarkan adalah konsolidasi fiskal, di mana defisit anggaran dapat dikurangi tanpa khawatir akan berpengaruh buruk terhadap perekonomian (Solikin, 2018).

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbentuk time series pada tahun 2009-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara, sedangkan variabel indeks secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara dan secara simultan pengeluaran pemerintah dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2009-2021 (Goni, Kalangi, Tolosang, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2005-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa time series. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara simultan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan (Padambo, Kawung, Rompas, 2021).

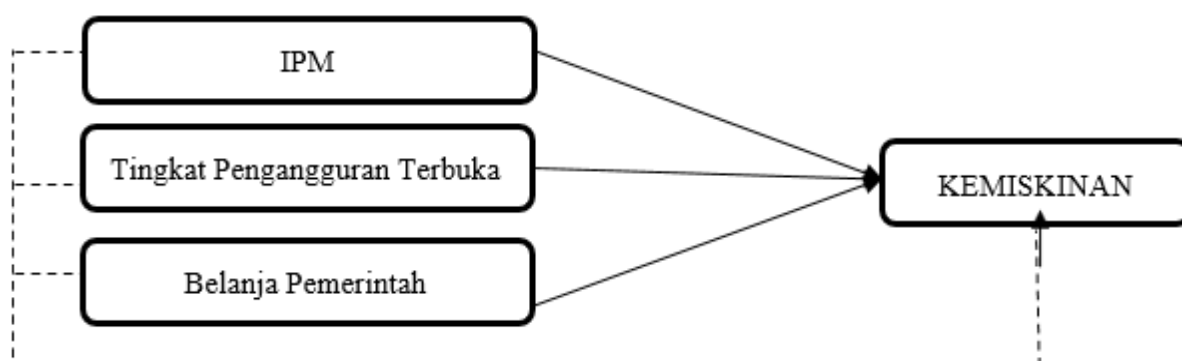
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan pengaruh pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2000-2017. Penelitian ini menggunakan Metode analisis deskriptif dan kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi (Ardian, Yulmardi, Bhakti, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengangguran, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2005-2019. Penelitian ini menggunakan analisis data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengangguran maka akan semakin tinggi tingkat kemiskinan dan berpengaruh secara signifikan, dengan demikian hipotesis diterima. Adanya pengaruh secara simultan antara pengangguran, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2005-2019 (Lumowa, Noukoko, Rompas, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran, dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2012 – 2017. Penelitian ini menggunakan Metode analisis yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan regresi panel dengan metode estimasi Fixed Effect menggunakan software Eviews 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel IPM dan Belanja Pemerintah memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan, Sedangkan variabel PDRB dan Tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (Nugroho, 2020).

## 2.6 Kerangka Berpikir

Gambar 1 Kerangka Berpikir



Sumber : Data Olahan Penulis

Keterangan :

—————→ = Berpengaruh secara parsial

-----→ = Berpengaruh secara simultan

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Diduga indeks pembangunan manusia (IPM) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka mempunyai pengaruh yang positif terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Diduga belanja pemerintah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow.
4. Diduga variabel indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan belanja pemerintah, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### Data dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh tidak berhubungan langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang dimaksud berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data times series dari tahun 2015 sampai tahun 2021.

#### Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri dari data kuantitatif dengan metode pengumpulan data sebagai berikut :

Data sekunder : - Badan Pusat Statistik Bolaang Mongondow  
 - Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara  
 - DJPK Kemenkeu Data APBD

#### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

- 1) Kemiskinan : Data kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data persentase penduduk miskin Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2015-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolaang Mongondow.
- 2) Indeks Pembangunan Manusia : Data IPM yang dipakai dalam penelitian adalah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2015-2021 (persen) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolaang Mongondow.
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka : Data tingkat pengangguran terbuka yang dipakai dalam penelitian ini adalah persentase tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2015-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara
- 4) Belanja Pemerintah: Data belanja pemerintah yang dipakai dalam penelitian adalah data belanja pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2015-2021 (milyar) yang diperoleh dari DJPK Kemenkeu Data APBD.

#### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas (  $X_1, X_2, X_3, \dots, k$  ) terhadap variabel terikat (Y). Penelitian ini menggunakan alat analisis eviews.

Model regresi linier berganda untuk model persamaan penelitian sebagai berikut:

$$\text{Kemiskinan}_t = a_0 + a_1\text{IPM}_t + a_2\text{TPT}_t + a_3\text{BP}_t + e_t$$

#### Uji Hipotesis

##### • Uji Parsial (Uji t)

Uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Dengan menganggap variabel bebas lainnya konstan. Hipotesis

pengujian t-statistic adalah:

H<sub>0</sub> : Secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H<sub>1</sub> : Secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Jika probabilitas t-hitung > 0.05 maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak, sebaliknya jika probabilitas t-hitung < 0.05 maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%.

- **Uji Simultan (Uji F)**

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen). Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

- **Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketetapan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam suatu persamaan regresi. Koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel X (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>...X<sub>k</sub>), yang merupakan variabel bebas, menerangkan atau menjelaskan variabel Y yang merupakan variabel terikat. Semakin besar nilai koefisien determinasi, semakin baik kemampuan variabel X menerangkan atau menjelaskan variabel Y.

- **Uji Koefisien Korelasi (R)**

Uji koefisien korelasi (R) berfungsi untuk mencari besarnya hubungan antara dua variabel bebas (X<sub>i</sub>) atau lebih secara simultan dengan variabel terikat (Y). Koefisien korelasi biasa dilambangkan dengan huruf r dimana nilai r dapat bervariasi dari -1 sampai +1. Nilai r yang mendekati -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut dan nilai r yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Koefisien korelasi merupakan akar kuadrat dari koefisien determinasi dan dirumuskan sebagai berikut:  $R = \sqrt{R^2}$

- **Uji Asumsi Klasik**

- **Uji Normalitas**

Uji statistik yang digunakan untuk menilai normalitas dalam penelitian ini adalah uji *Jarque Bera* (JB) dengan *histogram-normality test*. Indikator yang digunakan untuk pengambilan keputusan bahwa data tersebut berdistribusi normal atau tidak adalah apabila nilai probabilitas lebih besar (>) dari tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  (0,05), maka data berdistribusi secara normal. Apabila nilai probabilitas lebih kecil (<) dari  $\alpha = 5\%$  (0,05), maka data tidak berdistribusi normal (Dwiyanti, Naukoko, Mandej, 2022).

- **Uji Multikoleniaritas**

Uji Multikoleniaritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel dalam suatu model. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF > 10, terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika VIF < 10, tidak terjadi multikolinieritas.

- **Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas (Napitupulu, 2017). Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yakni melihat Grafik Plot, uji Park, uji Glejser, dan uji White. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresi nilai absolut residual dari model yang diestimasi terhadap variabel-variabel penjelas. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah apabila nilai *probability Obs\*R squared* > taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$  (0,05) berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (*homoskedastisitas*).

- **Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi, digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain

pada model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan uji Breush-Godfrey atau disebut juga dengan uji *Lagrange-Multiplier* (LM-test). Jika *p-value obs\*R-square* < taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$  (0,05), maka dalam model regresi ada korelasi serial. Namun jika *p-value obs\*R-square* > taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$  (0,05), maka dalam model regresi tidak ada gejala autokorelasi (Sri Hartati, 2020)

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Hasil

##### Hasil Regresi Linier Berganda

**Tabel 3. Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	35.19720	7.833854	4.492961	0.0206
IPM	-0.003015	0.000766	-3.937748	0.0292
TPT	0.085957	0.113455	0.757628	0.5038
BP	-1.106702	1.249449	-0.885752	0.4410
R-squared	0.948731	Mean dependent var		7.854286
Adjusted R-squared	0.897462	S.D. dependent var		0.493858
S.E. of regression	0.158141	Akaike info criterion		-0.555101
Sum squared resid	0.075026	Schwarz criterion		-0.586009
Log likelihood	5.942852	Hannan-Quinn criter.		-0.937124
F-statistic	18.50494	Durbin-Watson stat		2.910733
Prob(F-statistic)	0.019402			

Sumber : Data diolah (Eviews 10)

Berdasarkan Tabel 4 di atas, maka model persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$K_t = 35.19720 - 0.3014787IPM_t + 0.085957TPT_t - 1.106702BP_t + e_t$$

Model persamaan regresi berganda tersebut menjelaskan hasil nilai konstanta dari persamaan regresi sebesar 35.19720 artinya apabila IPM, TPT dan BP konstan atau tetap, maka Kemiskinan adalah sebesar 35.19720%. Koefisien regresi variabel IPM (X1) sebesar -0.3014787 artinya bahwa apabila IPM mengalami peningkatan sebanyak 1 persen, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0.3014787 %. Koefisien variabel TPT (X2) sebesar 0.085957 artinya bahwa apabila TPT meningkat sebesar 1 persen maka kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 0.058073%. Koefisien variabel BP (X3) sebesar -1.106702 artinya bahwa apabila BP mengalami peningkatan sebanyak 1 persen, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 1.106702 %.

##### Uji Hipotesis

##### Uji t-statistik

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau  $\alpha = 5\%$  dan  $df = n - k = 3$ , maka diperoleh t-tabel sebesar 2,353. Dasar pengambilan keputusan: Jika t- hitung < t-tabel dan prob. > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Jika t-hitung > t-tabel dan prob. < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.5 maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil output regresi pada tabel 4.5 diperoleh t-hitung sebesar -3,937748 dan nilai probabilitas sebesar 0,0292. Karena nilai t-hitung < nilai t tabel (-3,937748 < 2,920) dan nilai probabilitas IPM 0,0310 < 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti bahwa secara statistik Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

##### b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Hasil output regresi pada tabel 4.5 diperoleh t-hitung sebesar 0,757628 dan nilai probabilitas sebesar 0,5038. Karena nilai t-hitung < nilai t tabel (0,757628 < 2,920) dan nilai probabilitas TPT 0,5038 > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak berarti bahwa secara statistik Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow.



c) Belanja Pemerintah (BP)

Hasil output regresi pada tabel 4.5 diperoleh t-hitung sebesar -0.885752 dan nilai probabilitas sebesar 0,4410. Karena nilai t-hitung < nilai t tabel (-0.885752 < 2,920) dan nilai probabilitas BP 0,4410 > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak berarti bahwa secara statistik Belanja Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

**Uji F**

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Dari hasil output regresi pada tabel 4.5 menunjukkan nilai F-statistik sebesar 18,50494 dan nilai probabilitas dari F-statistik yaitu 0.019402. Karena 0.019402 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan belanja pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Hasil output regresi pada tabel 4.5. menunjukkan nilai koefisien determinansi (R<sup>2</sup>) sebesar 0,948731. Hal ini menunjukkan bahwa 94,87% variasi dari tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan belanja pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow. Sedangkan sisanya sebesar 5,13% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

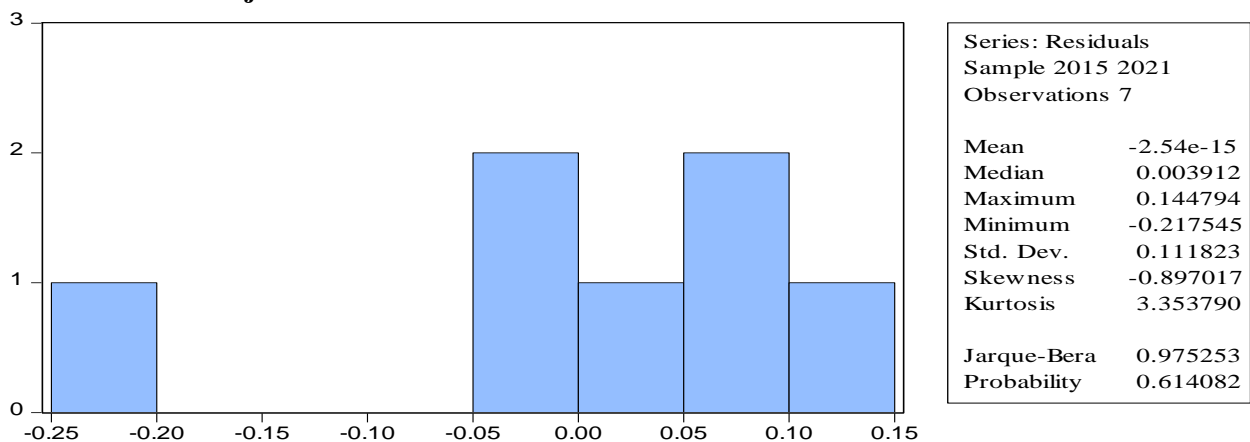
**Uji Koefisien Korelasi (R)**

Diketahui bahwa koefisien determinansi sebesar 0,948731, maka nilai koefisien korelasinya adalah 0.974028 yang merupakan akar dari R<sup>2</sup>. Jadi, hubungan antara variabel terikat (kemiskinan) dengan variabel bebas (IPM, TPT dan Belanja Pemerintah) sebesar 97,4%. Nilai ini menunjukkan hubungan yang kuat, karena nilai R mendekati +1.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

**Gambar 2. Hasil Uji Normalitas**



Sumber : Data diolah (Eviews 10)

Hasil output uji normalitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera (JB) sebesar 0,614082 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

**Uji Multikolinieritas**

**Tabel 4. Uji Multikolinieritas**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	61.36926	17177.51	NA
IPM	5.86E-07	7323.850	2.082816
TPT	0.012872	86.43386	1.933003
BP	1.561124	20715.65	2.462103

Sumber : Data diolah (Eviews 10)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang dapat dilihat pada kolom centered VIF. Nilai VIF untuk variabel IPM sebesar 2.082816, TPT sebesar 1.933003 dan BP sebesar 2.462103. Hal ini menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

### Uji Heterokedastisitas

**Tabel 5. Uji Heterokedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	3.981132	Prob. F(3,3)	0.1432
Obs*R-squared	5.594697	Prob. Chi-Square(3)	0.1331
Scaled explained SS	3.287745	Prob. Chi-Square(3)	0.3494

*Sumber : Data diolah (Eviews 10)*

Hasil uji Glesjer menunjukkan bahwa nilai probability Obs\*R- squared Prob. Chi-Square sebesar 0,1331 > 0,05. Hal ini berarti bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

**Tabel 6. Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	7.156332	Prob. F(2,1)	0.2555
Obs*R-squared	6.542862	Prob. Chi-Square(2)	0.0380

*Sumber : Data diolah (Eviews 10)*

Berdasarkan uji LM test dapat dilihat bahwa nilai probability Obs\*R-squared Prob. Chi-Square sebesar 0,0380 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada korelasi serial.

## 4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel IPM sebesar -0,301478, artinya bahwa apabila indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan 1 persen maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,301478 jiwa. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) mempunyai pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara, variabel indeks pembangunan manusia secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara (Goni et al., 2022). Hasil Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu tentang Analisis Pengaruh Petumbuhan Ekonomi Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, variabel Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan (Padambo, Kawung, Rompas 2021).

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel TPT sebesar 0.085957 artinya bahwa apabila tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan 1 persen maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.085957 jiwa. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi (Ardian, Yulmardi, Bhakti, 2021).

Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel belanja pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel belanja pemerintah sebesar -1.106702 yang artinya apabila belanja pemerintah naik sebesar 1 milyar maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 1.106702 ribu jiwa.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian mengenai Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu belanja pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (Goni, Kalangi, Tolosang 2022).

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai F-statistik sebesar 18,50494 dan nilai probabilitas dari F-statistik yaitu 0,019402. Karena  $0,019402 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan belanja pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang nyata terhadap kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

## 5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan pemerintah untuk meningkatkan kebijakan terhadap penanggulangan kemiskinan serta melakukan observasi lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow dikarenakan hasil dari penelitian ini yaitu variabel indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka dan belanja pemerintah masih belum mengatasi tingkat kemiskinan secara signifikan. Pemerintah dapat memberi peluang usaha kepada masyarakat dan membuat program-program bagi masyarakat agar bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia serta mengalokasikan belanja pemerintah dengan baik, dan diharapkan bisa ditargetkan secara tepat agar masyarakat sejahtera dan dapat mengurangi kemiskinan di kabupaten Bolaang Mongondow.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, R., Yulmardi, Y., & Bhakti, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(1), 23–34.
- Bappenas. (2018). Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi. *Kedeputian Bidang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan*, 1–80.
- BPS. (2021). Indeks Pembangunan Manusia 2020. *Badan Pusat Statistik*, 4(1), 88–100.
- Nugroho. (2020). Analisis Pengaruh Pdrb, Ipm, Tingkat Pengangguran Dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Suparyanto Dan Rosad (2015)*, 5(3), 248–253.
- Dita Sekar Ayu. (2018). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur (Tahun 2010-2015). *Photosynthetica*, 2(1), 1–13.
- Dwiyanti, G. I., Naukoko, A. T., & Mandei, D. (2022). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Tana Toraja Gabriela Ika D Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Gabriela Ika D. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(6), 13–24.
- F.Tuwonaung, B. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 133–144.

Febrianto, R. (2017). Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Timur 2011-2015. *Jurnal*

- Girsang, W. (2011). Kemiskinan Multidimensional Di Pulau-Pulau Kecil. In *Sosiologi Pedesaan*.
- Goni, N., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 22(5)*, 121–132.
- Hildegunda, W. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Pemekaran Tingkat Kabupaten (Studi Kasus Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum Dan Sesudah Pemekaran di Kabupaten Nagekeo Propinsi NTT Tahun 2005-2009). *Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9)*, 1689–1699.
- HM, M. (2018). Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi. *Al- Buhuts, 11(1)*, 42–66.
- Lumowa, R. P., Noukoko, A. T., & Rompas, W. F. I. (2021). Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2019. *Berkala Ilmiah Efisiensi, 21(06)*, 82–91.
- Napitupulu, L. A. B. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasional, Motivasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Rumah Sakit Swasta Di Kota Pekanbaru. *Jurnal JOM Fekon, 4(1)*, 338–352.
- Padambo, M. R., Kawung, G. M. V, & Rompas, W. F. I. (2021). Analisis Pengaruh Petumbuhan Ekonomi Inflasi Dan Indeks Pebangunan Manusia Terhadap KPadambo, M. R., Kawung, G. M. V, & Rompas, W. F. I. (2021). Analisis Pengaruh Petumbuhan Ekonomi Inflasi Dan Indeks Pebangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sul. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 21(5)*, 15–27.
- Pratama, Y. C. (2019). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Tujuan dari penelitian ini ada. *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis, 1(2)*, 1–15.
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 10(2)*, 121–130.
- Solikin, A. (2018). Pengeluaran Pemerintah Dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) Di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis. *Info Artha, 2(1)*, 65–89.
- Sri Hartati, S. S. B. (2020). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan perbankan. *AmaNU : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Suwono AmaNU : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi, 3(1)*, 55–72.
- Sukirno, S. (2013). Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. In *RajaGrafindo Persada. Jakarta* (p. 430).